



**PUTUSAN**

Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7304111907970001, tempat tanggal lahir Bonto Manai, 19 Juli 1996, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bonto Manai, 01 Juni 1998, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp., tanggal 13 Desember 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, 01 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0151/002/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon, selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, namun tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016, pemohon dan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Termohon kurang menaruh hormat terhadap pemohon sebagai seorang suami, kurang memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan mengurus rumah tangga seperti jarang memasak dan mengurus pemohon ketika pulang dari bekerja;
- Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kasar, dan sering mendiami pemohon;
- Orangtua termohon masih sering ikut campur terhadap rumah tangga keduanya;
- Termohon tidak menghargai pemberian nafkah yang diberikan oleh pemohon, dan selalu merasa tidak cukup;
- Termohon kurang menghargai orangtua pemohon;

5. Bahwa, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, pemohon pergi meninggalkan termohon dengan alasan tidak lagi menginginkan kehadiran pemohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan termohon, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. majelis hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, XXXXXXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan, termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran termohon tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan sah dan dibenarkan hukum.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati agar pemohon rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon, maka majelis menilai Termohon tidak hendak mempertahankan hak-hak Termohon di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK.7304111907970001 tanggal 22-04-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. Pemohon NIK.7304110803190006 tanggal 08-03-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, (bukti P.2);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0151/002/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, (bukti P.3);

Bahwa, masing-masing alat bukti telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai telah telah dimeterai yang cukup, serta diberi tanda bukti P.1, P.2, dan P.3;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. H. Mansyur Tutu bin Dg. Lalo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mentaati dan menaruh hormat kepada Pemohon dan saksi, dengan kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon maupun tidak mau menerima nafkah pemberian saksi ;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama selama 1 tahun;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah merukunkan pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. Sumita binti H. Kammisi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mentaati dan menaruh hormat kepada Pemohon dan orangtua Pemohon, dengan merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, namun tidak mau menerima nafkah pemberian orangtua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah merukunkan pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil..

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada permohonannya untuk mohon izin menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jeneponto secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek. (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon memohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan sejak bulan April 2016 antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak mentaati dan menghormati Pemohon dan orangtua Pemohon, tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, serta orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akibatnya sejak bulan Nopember 2018 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon (vide Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3, hal mana bukti P.3 tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga dengan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan terbukti pula Pemohon memiliki alas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* terhadap Termohon ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini ada adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan sebagian keterangan diperoleh oleh saksi dengan cara melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menaruh hormat terhadap Pemohon dan orangtua Pemohon, tidak bersedia tinggal bersama di rumah Pemohon, orangtua Termohon ikut campur dalam mengambil keputusan keluarga dan Termohon suka marah-marah dan mengusir Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg., dalil Pemohon yang telah dikuatkan oleh alat bukti yang cukup, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemoho selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Temohon tidak mentaati dan menaruh hormat kepada Pemohon dan orangtua Pemohon, dengan merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, namun tidak mau menerima nafkah pemberian orangtua Pemohon;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, tanpa saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa para saksi Pemohon telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, hingga sekarang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan ini dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Jeneponto berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, namun karena perkara ini adalah cerai talak, maka yang disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak. Ketentuan ini kemudian diperbaharui dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 yang mengatur bahwa penyampaian salinan putusan tidak perlu lagi, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Imron, S.Ag., M.H., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                |           |
|----|----------------|-----------|
| 1. | Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
|----|----------------|-----------|

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	300.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)